



Truk Jatuh dari Tol

Sebuah truk jatuh dari KM 72 Tol Tangerang–Merak hingga terguling di sekitar perlintasan kereta api Rangkasbitung–Merak, kawasan Unyur, Kota Serang, Banten, Selasa (25/8/2026). Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 14.30 WIB itu sempat menghambat perjalanan kereta api dan menyebabkan dua orang terluka. (Ist.ANTARA)

JABATAN TANPA TENGGAT KAPOLRI DIGUGAT

MK Diminta Putuskan Maksimal 5 Tahun dan Perpanjangan 1 Kali

Pintu Mahkamah Konstitusi (MK) kembali diketuk dan berhadapan dengan pertanyaan yang sama untuk keempat kalinya. Sampai kapan seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dapat menduduki jabatannya? Melalui Perkara Nomor 315/PUU-XXIV/2026, dua warga negara, Saras Sandriyanti dan Lisdawati Manao, mendaftarkan permohonan pada 20 Agustus 2026. Pemohon menguji Pasal 11 ayat (2) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga UU Polri. Mereka meminta Mahkamah menetapkan masa jabatan Kapolri selama 5 tahun dan dapat diperpanjang paling banyak satu kali. Dikhawatirkan bila masa jabatan tak ada tenggat bisa membuka ruang subjektivitas politik eksekutif. Saat ini sendiri, berdasarkan data Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memegang rekor sebagai Kapolri dengan masa jabatan terlama di era Reformasi. Pada 27 Januari 2021 dilantik oleh Presiden ke-7 Joko Widodo). Hingga saat ini di era Prabowo Subianto (Agustus 2026), ia telah menjabat selama lebih dari 5 tahun 6 bulan. **SELENGKAPNYA DI HAL 11....**

Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

	Sutanto Masa Jabatan: 8 Jul 2005 – 30 Sep 2008 Lama Menjabat: 3 tahun 2 bulan
	Bambang Hendarso Danuri Masa Jabatan: 1 Okt 2008 – 22 Okt 2010 Lama Menjabat: 2 tahun 0 bulan
	Timur Pradopo Masa Jabatan: 22 Okt 2010 – 25 Okt 2013 Lama Menjabat: 3 tahun 0 bulan
	Sutarman Masa Jabatan: 25 Okt 2013 – 16 Jan 2015 Lama Menjabat: 1 tahun 2 bulan *

KETERANGAN

* (Selesai menjabat di awal era Jokowi)

DAFTAR KAPOLRI BESERTA LAMA MASA JABATAN



Era Presiden Joko Widodo (2014-2024)

	Badrodin Haiti Masa Jabatan: 17 Apr 2015 – 13 Jul 2016 Lama Menjabat: 1 tahun 2 bulan
	Tito Karnavian Masa Jabatan: 13 Jul 2016 – 22 Okt 2019 Lama Menjabat: 3 tahun 3 bulan
	Idham Azis Masa Jabatan: 1 Nov 2019 – 27 Jan 2021 Lama Menjabat: 1 tahun 2 bulan
	Listyo Sigit Prabowo** Masa Jabatan: 27 Jan 2021 – Sekarang*** Lama Menjabat: 5 tahun 7 bulan

** (Masih aktif hingga masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto)

*** (Per Agustus 2026)



PRABOWO KEJAR PLTS 100 GWP RAMPUNG 2029, TARGETKAN EFISIENSI RP73,9 T

Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia bergerak lebih cepat meninggalkan ketergantungan pada energi fosil. Salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWP) yang ditargetkan rampung pada 2029. Program tersebut resmi diluncurkan melalui seremoni launching dan groundbreaking di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).



Presiden Prabowo Subianto meluncurkan proyek PLTS 100 Gwp di Bali, Selasa (25/8/2026). (Dok. YouTube Setpres)

Dari target 100 GWP, pemerintah memulai tahap awal melalui 14 proyek dengan total kapasitas 5,3 GWP yang tersebar di sejumlah wilayah.

Peluncuran ini menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional. Program PLTS 100 GWP juga ditempatkan dalam Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembangunan tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sekaligus memperkuat sistem energi nasional.

"Program ini merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air, yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil," ujar Prasetyo.

Presiden Prabowo sebelumnya telah memberikan target agar pembangunan PLTS dilakukan secara agresif. Pemerintah menargetkan kapasitas 100 GWP dapat direalisasikan dalam tiga tahun, atau paling lambat 2029.

Bahkan, Prabowo meminta target tersebut tidak berhenti pada tiga tahun. Ia menantang jajaran yang menangani sektor energi agar dapat menyelesaikannya dalam waktu dua tahun.

"Dan kita tidak main-main. Target kita adalah 100 Gigawatt dalam tiga tahun," kata Prabowo saat peluncuran program di Gilimanuk.

Prabowo kemudian membandingkan target tersebut dengan percepatan program swasembada pangan. Menurut dia, target pangan yang semula diberikan dalam waktu empat tahun ternyata dapat dicapai lebih cepat.

"Dulu swasembada pangan saya beri target empat tahun, tim ekonomi, tim pertanian, tim pangan berhasil satu tahun. Berarti kalau saya kasih target tiga tahun untuk tim energi, ya tidak lah, dua tahun lah ya. Kalau berhasil dua tahun, tim energi dapat bintang lagi aku kasih tanda kehormatan," ujar Prabowo.

Bagi Prabowo, pembangunan PLTS dalam skala 100 GWP bukan hanya soal menambah pembangkit listrik. Proyek tersebut merupakan bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap energi yang harganya dipengaruhi kondisi global.

"Saya tidak mau banyak bicara tetapi intinya 100 Gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia," kata Prabowo.

Salah satu alasan pemerintah mengejar pembangunan PLTS dalam skala besar adalah persoalan biaya pembangkitan listrik. Pemerintah memperkirakan program 100 GWP dapat menghasilkan efisiensi sekitar

Rp73,9 triliun setiap tahun. Presiden menyebut angka tersebut berkaitan dengan penurunan biaya pokok produksi listrik.

Sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan efisiensi tersebut terutama berasal dari berkurangnya kebutuhan solar untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Artinya, angka Rp73,9 triliun tidak berarti seluruh pelanggan listrik otomatis mendapatkan potongan tagihan senilai Rp73,9 triliun. Efisiensi yang dimaksud merupakan penghematan dalam sistem penyediaan listrik dan subsidi energi akibat berkurangnya ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar solar.

Bahlil mengatakan saat ini masih terdapat pembangkit listrik yang menggunakan solar. Karena itu, pemerintah ingin menggantinya dengan PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi.

"Dari total pekerjaan ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun," ujar Bahlil.

Ia menilai penggunaan energi surya dapat mengurangi kebutuhan impor BBM, terutama solar, karena sebagian pembangkit diesel secara bertahap dapat digantikan oleh pembangkit berbasis energi matahari.

"Jadi, ini Bapak, kalau ini mampu kita bisa lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jenis solar akan turun dan semuanya

Tahap Awal PLTS 5,3 GWP

**Total tahap awal:
14 proyek dengan kapasitas
sekitar 5,3 GWP.**

Siap tender

6 proyek (4.548,92 MWp):

- PLTS Terapung Jatiluhur 1.688 MWp, Purwakarta.
- PLTS Terapung Cirata 1.250 MWp, Purwakarta.
- PLTS Terapung Jatigede 636 MWp, Sumedang.
- PLTS + BESS Klaster Madura 605 MWp, Sumenep; untuk mengurangi penggunaan BBM.
- PLTS Bali 300 MWp, Gilimanuk; mengurangi penggunaan BBM dalam sistem kelistrikan Bali.
- PLTS Lahan Bank Tanah Purwakarta 69 MWp.

Groundbreaking (3 proyek)

- PLTS Banyuwangi - 130,2 MWp.
- PLTS Pasuruan - 132 MWp.
- PLTS Terapung Gajah Mungkur 134,2 MWp.

Sudah konstruksi (3 proyek)

- PLTS Terapung Karangates 133 MWp, progres 56,54%.
- PLTS Terapung Saguling 92 MWp, progres 44,4%.
- PLTS Tembesi 46 MWp, progres 65%.

Proyek wilayah terpencil:

- PLTS Pulau Sembur 0,92 MWp, Kepulauan Riau.
- PLTS Pulau Rengit 0,078 MWp, Bangka Belitung.

Catatan: Keseluruhan 100 GWP PLTS ditargetkan selesai pada 2029.

akan kita memakai energi nasional," kata Bahlil.

Pemerintah sebelumnya juga menargetkan pembangunan 30 GW PLTS pada 2026 sekaligus mempercepat penghentian sekitar 13 GW PLTD. Presiden menyebut Indonesia memiliki keuntungan berupa paparan sinar matahari yang tersedia hampir sepanjang tahun.

Dengan demikian, PLTS 100 GWP diposisikan sebagai bagian dari perubahan sumber energi pembangkit listrik, bukan semata-mata proyek penambahan kapasitas. (tin,rls,ant/dya)

PROJO LURUSKAN PERNYATAAN BUDI ARIE SOAL 'PERCEPATAN SEJARAH'

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membuka wacana tentang kemungkinan terjadinya 'percepatan sejarah' politik sebelum Pemilu 2029. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah forum yang dihadiri Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan kemudian beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Budi Arie tampak duduk di samping Jokowi. Riak politik pun mencuat. Projo kemudian memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar di media sosial merupakan potongan dari forum yang lebih panjang.

Dalam video yang beredar, Budi Arie menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan perubahan politik yang berlangsung lebih cepat dari jadwal pemilu lima tahunan. Budi mengaku telah menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada Jokowi secara langsung.

"Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?' Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 2029, pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?" kata Budi dalam video yang beredar.

Budi kemudian mengaitkan pandangannya dengan sejumlah fenomena sosial yang menurut dia menunjukkan adanya kondisi "abnormal" di masyarakat. Ia menyebut aksi demonstrasi di Pati dan Madura serta menghubungkannya dengan pengalaman gerakan sosial menjelang Reformasi 1998.

"Jangan maksud saya gini loh, saya pengalaman dengan gerak sejarah ini ada yang abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo Pati, Madura demo lagi ikut pertandingan, ini kayak Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa nih 1998, pasti kalah yang preman," ujarnya.

Menurut Budi, berbagai fenomena tersebut merupakan "anomali-anomali variabel" yang membuat elite politik tidak cukup hanya menyiapkan skenario konvensional. Ia meminta para relawan mempertimbangkan kemungkinan perubahan politik di luar tahapan yang selama ini diasumsikan.

"Cuman maksud saya terjadi anomali-anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekadar memikirkan skenario-skenario konvensional."

Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya," kata dia.

Budi kemudian menggunakan pengalaman politik menjelang Reformasi sebagai pembanding. Ia menyinggung perubahan dari Pemilu 1997 ke Pemilu 1999 yang berlangsung setelah Presiden Soeharto mundur pada 1998.

"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadinya yang namanya patahan sejarah



Ketua Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).ist

bagaimana tahun 1997 tiba-tiba Pemilu berikutnya 1999. Potensi ini bukan enggak ada, sangat besar, dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pernyataannya bukan untuk memastikan perubahan tersebut akan terjadi, melainkan membuka kemungkinan agar para relawan tidak terpaku pada satu skenario politik.

"Saya insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya coba mau membuka wacana saja ke teman-teman supaya berpikir jangan hanya sekadar berpikir 2029 harus ada pikiran lain alternatif manakala terjadi percepatan sejarah," kata Budi.

Projo: Video Bukan Rekaman Utuh

Pernyataan tersebut segera memicu tafsir politik. Terlebih, Budi menyampaikannya ketika Jokowi berada di sampingnya. Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex Damanik kemudian memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar di media sosial merupakan potongan dari forum yang lebih panjang.

"Pertama, video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan," kata Freddy kepada awak media, Selasa (25/8/2026).

Menurut Freddy, forum tersebut

merupakan acara silaturahmi dalam rangka bulan Kemerdekaan Republik Indonesia antara Jokowi dan para relawannya. Dalam forum itu terdapat diskusi internal mengenai situasi kebangsaan.

"Yang kedua, forum tersebut diadakan sebagai acara silaturahmi dalam rangka bulan Kemerdekaan Republik Indonesia antara Bapak Jokowi dengan para relawannya," ujar Freddy.

Ia menjelaskan, para relawan menyampaikan berbagai masukan kepada Jokowi mengenai kondisi nasional. Masukan itu digunakan untuk memetakan persoalan sekaligus kemungkinan solusi bagi perbaikan bangsa.

Harapannya, Jokowi dapat meneruskan aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Freddy mengatakan para relawan meyakini hubungan dan komunikasi Jokowi dengan Prabowo masih berjalan erat.

Dalam forum itu, kata Freddy, Jokowi justru meminta para relawan tetap tenang. Jokowi disebut menilai situasi nasional masih terkendali.

"Pak Jokowi mendengarkan seluruh pandangan relawan terhadap situasi yang berkembang saat ini sebelum akhirnya Pak Jokowi menyampaikan agar semua tetap tenang, situasi baik-baik saja, ekonomi masih tumbuh baik, inflasi terkendali jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan," ujar Freddy.

Klarifikasi serupa disampaikan Projo melalui kanal resminya.

HUBUNGAN HISTORIS DAN POLITIK BUDI ARIE-JOKOWI

- **Pendiri Projo:**
Budi Arie Setiadi adalah pendiri sekaligus Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat terbesar yang mengawal kemenangan Jokowi sejak Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019.
- **Posisi di Pemerintahan:**
Sebagai bentuk apresiasi dan kepercayaan, Jokowi mengangkat Budi Arie ke dalam kabinet, dimulai dari Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019–2023), lalu naik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (2023–2024).
- **Keberlanjutan ke Rezim Prabowo:**
Atas arahan politik yang selaras dengan Jokowi, Budi Arie dan Projo melabuhkan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, yang membawa Budi Arie kembali masuk kabinet baru sebagai Menteri Koperasi.
- Budi Arie Setiadi resmi keluar dari Kabinet Merah Putih setelah dicopot (direshuffle) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025



Organisasi relawan tersebut meminta publik membaca video Budi secara utuh dan proporsional, bukan menarik kesimpulan hanya dari potongan pernyataan.

Di tengah klarifikasi Projo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) justru melihat pernyataan Budi sebagai persoalan politik. Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai wacana "percepatan sejarah" tidak semestinya muncul ketika hubungan Jokowi dan Prabowo disebut masih baik.

"Jadi gini. Ya sangat disayangkan gitu bahwa hal-hal seperti itu harus mengemuka di saat hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu masih baik-baik saja. Jadi ini kami melihatnya adalah hanya kepentingan pribadi dari Budi Arie. Ya kepentingan pribadi yang lebih menguat di situ," kata Bestari.

Bestari menduga pernyataan tersebut berkaitan dengan kekecewaan pribadi Budi setelah tidak lagi menjadi menteri. Ia juga menyinggung kabar bahwa Budi tidak diterima bergabung dengan partai politik tertentu. (gus,ist,rls,okz/dya)

DUA HARI BERTURUT-TURUT PESAWAT MILITER TERGELINCIR DI BANDARA HASANUDDIN

Dua pesawat militer mengalami insiden tergelincir di kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan, dalam dua hari berturut-turut. Senin (24/8/2026), pesawat tempur Sukhoi Su-30 MK2 milik TNI Angkatan Udara (TNI AU) keluar dari batas landasan. Sehari kemudian, giliran pesawat Cassa milik TNI Angkatan Laut (TNI AL) mengalami insiden saat mendarat.

Suasana petugas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan pihak terkait mencoba melakukan evakuasi pesawat Cassa yang tergelincir di kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulsel, Selasa (25/8/2026). (Antara).



Rentetan kejadian tersebut terjadi di dua landasan pacu berbeda. Sukhoi keluar dari ujung runway 13 pada Senin, sedangkan Cassa U-6215 tergelincir di runway 03 pada Selasa (25/8/2026).

Meski sama-sama berakhir dengan pesawat keluar dari area landasan, penyebab kedua insiden tersebut berbeda berdasarkan penjelasan sementara masing-masing matra. TNI AU menyebut Sukhoi mengalami kendala pada sistem pengereman saat menjalani test flight. Sementara Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) menyatakan Cassa mengalami ban utama sebelah kanan kempis atau pecah setelah menyentuh landasan.

Insiden kedua terjadi pada Selasa siang. Pesawat NC-212-200 Aviocar milik TNI AL dengan nomor ekor U-6215 dari Skadron Udara 600 Wing Udara 2 Puspenerbal mengalami kendala teknis ketika melakukan pendaratan di Bandara Sultan Hasanuddin.

Kepala Dinas Penerangan Puspenerbal Letkol Eko Hadi Setyawan mengatakan insiden terjadi sekitar pukul 11.21 Wita. Pesawat mendarat di runway 03. Sesaat setelah roda menyentuh landasan dan memasuki fase landing roll, ban utama di sisi kanan mengalami kempis atau pecah.

"Pesawat melangsungkan pendaratan di Runway 03 Bandara Sultan Hasanuddin. Sesaat setelah menyentuh landasan dan melakukan landing roll, ban utama sebelah kanan

mengalami kempis/pecah (R/H Main Tyre Flat)," kata Eko dalam keterangan yang diterima media.

Kondisi ban tersebut membuat pesawat tidak lagi bergerak lurus mengikuti jalur landasan. Pesawat kemudian menyimpang ke arah kanan hingga keluar dari tepi runway.

Menurut Eko, pesawat bergerak keluar dari batas landasan sejauh kurang lebih 26,2 meter.

Situasi tersebut langsung direspons awak pesawat. Kru yang terdiri dari Kapten Laut (P) Galih, Kapten Laut (P) Nova, dan Letda Laut (P) Rendy menjalankan prosedur keselamatan dengan melakukan emergency cut engine sesuai standar operasional prosedur.

Langkah itu dilakukan untuk meminimalkan risiko setelah pesawat keluar dari jalur landasan.

"Ketiga kru selamat tanpa cedera. Sementara pemeriksaan teknis masih berlangsung," ujar Eko.

Tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun awak pesawat yang mengalami cedera dalam insiden tersebut.

Setelah pesawat berhenti di luar tepi runway, personel di lapangan langsung mengamankan lokasi. Puspenerbal berkoordinasi dengan Lanud Sultan Hasanuddin dan pengelola Bandara Sultan Hasanuddin untuk menangani pesawat tersebut.

Selain pengamanan lokasi, tim teknis melakukan penggantian ban yang mengalami kerusakan. Setelah penanganan awal selesai, pesawat

kemudian dievakuasi dari area runway menuju Apron Lanud Hasanuddin.

Proses evakuasi berlangsung selama beberapa jam. Puluhan petugas dan sejumlah kendaraan terlihat berada di sekitar pesawat Cassa. Menjelang sore, pesawat U-6215 berhasil dipindahkan dari area landasan.

Keterangan Puspenerbal menyebut pemeriksaan teknis terhadap pesawat masih dilakukan untuk memastikan kondisi pesawat setelah insiden.

Puspenerbal juga menegaskan bahwa keselamatan penerbangan menjadi prioritas dalam proses penanganan tersebut.

"Puspenerbal menegaskan komitmennya terhadap keselamatan penerbangan (flight safety) dan berupaya agar penanganan teknis serta evakuasi pesawat dapat diselesaikan secepatnya tanpa mengganggu kelancaran operasional penerbangan sipil di Bandara Sultan Hasanuddin," kata Eko.

Tetap Beroperasi, Penerbangan Delay

Insiden Cassa tidak membuat seluruh aktivitas Bandara Sultan Hasanuddin berhenti. Pengelola bandara menyatakan penerbangan sipil tetap berlangsung karena bandara memiliki dua landasan pacu.

PGS Branch Communication and CSR Department Head Bandara Sultan Hasanuddin, Taufan Yudhistira, membenarkan adanya pesawat Cassa yang tergelincir di runway 03-21.

"Informasi mengenai pesawat Cassa tergelincir memang benar dan saat ini sedang dalam penanganan," ujar Taufan.

Ia juga menjelaskan bahwa informasi mengenai kejadian tersebut muncul setelah video pesawat yang berada di sekitar landasan beredar di media sosial.

"Berdasarkan video viral yang beredar melalui media sosial, memang benar telah terjadi kejadian tersebut di Bandara Sultan Hasanuddin di landasan pacu utara-selatan (runway 03-21)," kata Taufan.

Menurut dia, operasional penerbangan tetap dapat dilakukan melalui runway lainnya.

"Kecelakaan terjadi di runway 03-21. Personel bandara segera menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Saat ini, masih dilakukan penanganan," kata Taufan dalam keterangan lainnya.

Namun, laporan di lapangan menunjukkan sejumlah penerbangan mengalami perubahan jadwal pada Selasa siang. Berdasarkan papan informasi keberangkatan atau Flight Information Display System (FIDS) sekitar pukul 14.56 Wita, sejumlah penerbangan tercatat mengalami penundaan. (tin rls, ant, kum/dya)



Pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara tergelincir di landasan pacu Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (24/8/2026). (antara)

Jelang Muktamar NU ke-35

BURSA KETUM MENGHANGAT: 7 NAMA DAN 3 POROS BEREPUT ARAH

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) tinggal menghitung hari. Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, forum tertinggi organisasi itu tak hanya akan membahas program dan persoalan keumatan. Pada Sabtu (29/8/2026) para peserta dijadwalkan menentukan Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmah 2026-2031. Sedikitnya tujuh nama yang masuk dalam percakapan utama. Mereka dipetakan ke dalam tiga poros berdasarkan rekam jejak dan gagasan yang ditawarkan

PBNU telah menetapkan rangkaian Muktamar berlangsung pada 27-30 Agustus 2026. Pembukaan dijadwalkan Kamis malam, 27 Agustus, di Lapangan Untung Suropati, Jombang, dengan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka forum tersebut. Sementara registrasi peserta dari unsur PWNU, PCNU, dan PCINU dimulai sehari sebelumnya.

Di tengah persiapan teknis itu, bursa calon Ketua Umum PBNU semakin mengerucut. Mengutip Majalah Risalah NU edisi khusus Muktamar Agustus 2026, menyebut sedikitnya tujuh nama yang masuk dalam percakapan utama. Mereka dipetakan ke dalam tiga poros berdasarkan rekam jejak dan gagasan yang ditawarkan yaitu struktural-berkesinambungan, pesantren tradisional, serta regenerasi atau pembaruan.

Pemetaan tersebut bukan berarti ketujuh tokoh telah resmi menjadi calon. Penentuan kandidat dan mekanisme pemilihannya tetap mengikuti tata tertib Muktamar.

Poros pertama adalah kelompok yang membawa narasi kesinambungan struktural. Di dalamnya terdapat Ketua Umum PBNU saat ini, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, dan Menteri Agama Prof. KH Nasaruddin Umar.

Gus Yahya secara terbuka menyatakan niat kembali memimpin PBNU pada 22 Juli 2026. Petahana tersebut menawarkan kelanjutan gagasan yang selama ini ia dorong, antara lain kemandirian organisasi serta agenda "Merawat Jagat, Membangun Peradaban". Ia juga dikenal membawa isu peran NU dalam diplomasi global dan penyelesaian konflik internasional.

Sementara Nasaruddin Umar membawa latar belakang yang berbeda. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal itu dipandang mewakili irisan ulama dan teknokrat. Dukungan dari sejumlah cabang NU di luar Jawa membuat namanya dikaitkan dengan gagasan desentralisasi kepemimpinan



organisasi dan pengalaman birokrasi pemerintahan.

Poros kedua berakar pada lingkungan pesantren tradisional. Tiga nama berada dalam kelompok ini yaitu KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, KH Muhammad Yusuf Chudluri atau Gus Yusuf, serta KH

Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin.

Gus Kikin merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Posisi tersebut memberinya modal historis sebagai bagian dari salah satu pesantren yang memiliki hubungan kuat dengan perkembangan NU. Dalam bursa ketua umum, ia

dipandang merepresentasikan otoritas pesantren dan kesinambungan tradisi klasik NU. (ton,ist,kcm/dya)

BURSA CALON KETUA UMUM PBNU DI MUKTAMAR KE-35 NU

KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya)

KH Zulfah Mustofa

KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin)

KH Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin)

KH Nasaruddin Umar

KH Muhammad Yusuf Chudluri (Gus Yusuf)

KH Abdussalam Shohib (Gus Salam)

Makam Gus Dur di Tebuireng Dibuka 24 Jam

MUKTAMAR ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang tak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi. Gelaran lima tahunan tersebut juga diperkirakan menggerakkan arus peziarah ke sejumlah pesantren yang memiliki ikatan sejarah kuat dengan NU.

Salah satunya Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU, pengelola pesantren mengubah jadwal ziarah dengan membuka akses ke kompleks makam para tokoh yang memiliki tempat penting dalam sejarah NU selama 24 jam.

Kebijakan itu berlaku selama rangkaian Muktamar yang dipusatkan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang,

mulai 27 hingga 31 Agustus 2026. Dua makam yang menjadi tujuan utama peziarah ialah makam Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan pendiri NU KH Hasyim Asy'ari.

Langkah tersebut disiapkan untuk memberikan ruang kepada para muktamirin, peninjau, maupun tamu Muktamar yang ingin berziarah dan bertawassul di Tebuireng.

Mudir V Bidang Pendidikan Formal Pesantren Tebuireng, KH Achmad Roziqi, mengatakan pembukaan akses tanpa batas waktu merupakan bentuk penghormatan kepada peserta Muktamar yang datang dari berbagai daerah.

"Kami membuka akses makam Pesantren Tebuireng secara penuh, karena kami hendak menghormati

para muktamirin yang hendak berziarah ke Tebuireng. Selama muktamar nanti ziarah akan dibuka 24 jam. Tidak ada waktu yang dilarang untuk berziarah," ujar Roziqi, dikutip, Selasa (25/8/2026).

Pada kondisi normal, akses ziarah di kompleks makam Tebuireng tidak berlangsung sepanjang hari. Peziarah biasanya dapat berziarah pada pukul 08.00-15.00 WIB dan kembali dibuka pada pukul 20.00-02.00 WIB.

Selama Muktamar ke-35 NU, pembatasan tersebut diabaikan. Peziarah dapat datang kapan saja, baik siang maupun malam. (toon,rls,ist/dya)

5 Kecamatan di Malang Kekeringan, 4 Diantaranya Sudah Digelontor Air Bersih



Distribusi air bersih di salah satu wilayah terdampak kekeringan musim kemarau 2026 di Kabupaten Malang. (foto: Pusdalops BPBD Kab. Malang)

MALANG - Kekeringan mengintai 5 kecamatan di Kabupaten Malang pada musim kemarau 2026. Hingga Senin (24/8/2026), empat di antaranya telah mendapat distribusi air bersih dengan total 400.000 liter. Sementara 1 kecamatan lainnya, yakni Kalipare, belum mendesak membutuhkan distribusi air.

"Memang berdasarkan dokumen hasil rapat koordinasi penetapan

status tanggap darurat kekeringan, ada lima kecamatan yang terdampak kekeringan dan memerlukan penanganan," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (25/8/2026).

Namun, hingga Senin (24/8/2026), ditegaskannya, distribusi air bersih baru menjangkau 6 titik yang tersebar di 4 kecamatan.

Berdasarkan data Pusdalops PB BPBD Kabupaten Malang, distribusi tersebut telah menyasar Desa Sumberagung, Desa Kedungbanteng, dan Desa Sitiarjo di Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Kemudian Desa Tumpakrejo di Kecamatan Gedangan, Desa Karangates di Kecamatan

Sumberpucung, serta Desa Sumberoto di Kecamatan Donomulyo.

Sementara itu, Kecamatan Kalipare menjadi satu-satunya wilayah dalam daftar 5 kecamatan tersebut yang hingga saat ini belum mendapatkan distribusi air bersih.

Sadono menjelaskan, kondisi tersebut lantaran belum ada pengajuan resmi dari wilayah Kalipare untuk mendapatkan bantuan distribusi air bersih. "Belum mengajukan. Berarti di sana masih belum krisis," kata Sadono.

Meski belum masuk kondisi krisis, bukan berarti Kalipare sepenuhnya terbebas dari ancaman kekeringan. Sadono menyebut potensi tersebut masih ada, salah satunya mengacu pada data kondisi kekeringan pada 2023.

Menurutnya, BPBD tidak hanya menunggu laporan dari pemerintah desa maupun kecamatan. Pemantauan terhadap kondisi wilayah juga dilakukan di lapangan.

Sadono mengatakan, apabila kondisi di suatu wilayah telah mencapai tingkat krisis dan masyarakat membutuhkan distribusi air bersih, pemerintah

wilayah akan menyampaikan laporan secara resmi kepada BPBD.

Di sisi lain, kondisi sejumlah wilayah di Kalipare saat ini disebut tidak sama dengan periode sebelumnya. Sadono menyebut telah terdapat sejumlah program penyediaan sumber air melalui pengeboran dan pipanisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Program tersebut, lanjut Sadono, antara lain dilakukan melalui Perumda Tirta Kanjuruhan maupun perangkat daerah teknis lainnya. Keberadaan program tersebut dinilai turut mengurangi potensi kekeringan dibandingkan kondisi pada periode sebelumnya.

"Sehingga kalau dibandingkan periode sebelumnya, harusnya sudah jauh menurun untuk kekeringan. Karena ada program-program pemerintah untuk pengeboran dan pipanisasi," imbuhnya.

Kendati telah terdapat program pengeboran dan pipanisasi, Kalipare tetap berpotensi mendapatkan distribusi air bersih apabila ketersediaan sumber air yang ada belum mencukupi kebutuhan masyarakat. (Santi/Dya)

Soal Insentif Guru PAUD, DPRD Kota Malang Sebut Baru Bisa Dikaji 2027

MALANG - Penambahan insentif bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Malang belum dapat dilakukan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2026 ini. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyebut penyesuaian insentif tersebut baru memungkinkan untuk dikaji pada tahun anggaran 2027.

"Memang kalau itu kami harus menghitung satuannya. Kalau untuk mengubah di akhir PAK ini seperti kami butuh mengubah aturannya juga, pasti di Perwalnya harus diubah," ujar Amithya, dikutip pada Selasa (25/8/2026).

Menurutnya, penyesuaian dapat dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya. "Yang memungkinkan di 2027. Kami harus berhitung juga dana transfer dari pusat akan seperti apa ke depannya, paling tidak proyeksinya. Baru nanti kami akan hitung kembali untuk guru-

guru PAUD," katanya.

Amithya menyebut, sebelumnya telah ada rencana pemberian insentif sebesar Rp1 juta bagi guru PAUD. Ia berharap besaran tersebut dapat ditingkatkan pada tahun anggaran berikutnya apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan.

Pembahasan terkait kenaikan insentif tersebut muncul di tengah adanya penambahan alokasi anggaran pada Disdikbud Kota Malang dalam rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026.

Berdasarkan dokumen laporan hasil pembahasan Banggar DPRD Kota Malang terhadap rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, anggaran Disdikbud bertambah sebesar Rp27.956.685.239,39.

Penambahan tersebut terdiri atas sejumlah pos anggaran. Salah satunya berasal dari SiLPA DAK Nonfisik Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp24.714.424.057.

Kemudian terdapat SiLPA DAK

Nonfisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp2.530.250.249, SiLPA DAK Nonfisik BOP Museum dan Taman Budaya sebesar Rp46.889.790, serta SiLPA Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp126.267.143,39.

Selain itu, terdapat alokasi untuk kegiatan Diklat Kepala Sekolah sebesar Rp403.854.000 serta penerimaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Afirmasi sebesar Rp135 juta.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan, pihaknya masih akan melakukan penghitungan apabila terdapat peluang untuk menaikkan insentif guru PAUD.

Ditegaskannta, pembahasan



Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. (Santi/Lentera)

mengenai kenaikan tunjangan tersebut akan dilakukan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. "Kami hitung sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada, lalu kami evaluasi untuk kenaikan tunjangan tersebut," ujarnya. (Santi/Dya)

SINGAPURA REKLAMASI BESAR-BESARAN, BAKAL GABUNGGAN 3 PULAU

Singapura kembali menatap laut untuk mencari ruang bagi masa depannya. Pemerintah negara-kota itu berencana menggabungkan sejumlah pulau di sebelah selatan Pulau Jurong melalui reklamasi untuk membentuk daratan baru yang ditujukan bagi industri generasi berikutnya, infrastruktur energi, hingga kebutuhan pertahanan.

Dikutip Selasa (25/8/2026), rencana tersebut disampaikan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam pidato National Day Rally 2026, Minggu (23/8/2026). Pulau Semakau, Pulau Bukom, dan Pulau Sudong termasuk di antara pulau yang dipertimbangkan untuk disatukan, bersama sejumlah pulau kecil lain. Daratan baru itu akan berada di kawasan barat Singapura, di selatan Pulau Jurong.

Namun, proyek tersebut belum memasuki tahap pembangunan. Wong menegaskan bahwa rencana itu merupakan agenda jangka panjang yang masih dikaji pemerintah.

"Ini adalah rencana jangka panjang. Kami sedang mempelajarinya dengan cermat," kata Wong, seperti dilaporkan Channel News Asia (CNA).

Dalam pidatonya, Wong mengatakan pembentukan daratan baru itu merupakan bagian dari strategi Singapura menghadapi keterbatasan lahan sekaligus menyiapkan kebutuhan ekonomi dan energi untuk beberapa dekade mendatang.

Ia merujuk pengalaman pembangunan Pulau Jurong. Kawasan tersebut sebelumnya merupakan kumpulan pulau kecil yang kemudian disatukan melalui reklamasi dan berkembang menjadi salah satu pusat

energi serta industri kimia Singapura.

"Pulau Jurong telah membentuk perekonomian kita selama 50 tahun terakhir," ujar Wong. Menurut dia, pulau barat yang baru nantinya dapat membantu membentuk Singapura untuk "50 tahun ke depan dan seterusnya."

Reklamasi bukan strategi baru bagi Singapura. Negara dengan wilayah daratan terbatas itu selama puluhan tahun menggunakan laut sebagai salah satu sumber tambahan lahan untuk perumahan, infrastruktur, maupun kawasan industri.

Pemerintah Singapura sendiri menyebut keterbatasan ruang membuat perencanaan tata ruang harus dilakukan untuk kebutuhan jangka panjang. Concept Plan yang pertama kali disusun pada 1971, misalnya, dirancang untuk memastikan ketersediaan lahan bagi pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi, serta kebutuhan ruang hijau dan rekreasi.

Pengalaman paling besar adalah pembentukan Pulau Jurong. Pemerintah menggabungkan sejumlah pulau di barat daya Singapura untuk menciptakan kawasan industri yang lebih luas. Pekerjaan reklamasi dimulai pada 1990-an dan rampung lebih cepat dari jadwal.

Menurut data pemerintah Singapura, proyek tersebut memperluas kawasan Jurong Island dari sekitar 1.000 hektare menjadi sekitar 3.000 hektare. Pulau itu kemudian berkembang menjadi pusat petrokimia dan energi dengan investasi lebih dari 50 miliar dolar Singapura sejak dibuka secara resmi pada 2000.

Wong melihat pola yang sama dapat diterapkan pada gugusan pulau di selatan Jurong.

"Proyek ini menciptakan banyak lapangan kerja yang baik. Proyek ini memperkuat industri-industri penting di sini. Proyek ini menjadikan Singapura sebagai simpul penting dalam aliran energi global," katanya.

Menurut Wong, pengalaman tersebut juga berkaitan dengan ketahanan energi Singapura, terutama ketika ketidakstabilan geopolitik mengganggu rantai pasok energi global.

"Semua itu telah memperkuat keamanan dan ketahanan energi kita, sesuatu yang telah kita saksikan berulang kali, terutama baru-baru ini di tengah gejolak di Timur Tengah," ujarnya.

Rencana reklamasi tersebut menarik perhatian karena

pulau-pulau yang akan menjadi bagian dari daratan baru itu selama ini memiliki fungsi yang berbeda.

Pulau Semakau dikenal sebagai lokasi tempat pembuangan akhir sampah lepas pantai Singapura. Pulau tersebut sebelumnya dihuni masyarakat dari sejumlah komunitas dan kemudian digabungkan dengan Pulau Seking pada 1990-an. Tempat pembuangan sampah di kawasan itu mulai beroperasi pada April 1999.

Pulau Bukom berada sekitar 5,5 kilometer di barat daya daratan utama Singapura. Pulau ini menjadi lokasi fasilitas minyak dan petrokimia terintegrasi, termasuk kilang minyak pertama Singapura. Kompleks industri tersebut kini meluas ke sejumlah pulau di sekitarnya.

Sementara itu, Pulau Sudong berada di lepas pantai selatan Singapura. Pulau ini memiliki luas sekitar 208,5 hektare pada 2013 dan sejak dekade 1980-an digunakan Angkatan Bersenjata Singapura sebagai kawasan latihan penembakan dengan peluru tajam. Pulau tersebut juga memiliki landasan pacu untuk kebutuhan darurat.

CNA melaporkan ketiga pulau tersebut, bersama beberapa pulau kecil lainnya, berpotensi membentuk satu daratan baru. (gus,cna,ist/dya)

“

Ini adalah rencana jangka panjang. Kami sedang mempelajarinya dengan cermat."

LAWRENCE WONG

Perdana Menteri Singapura



Memahami Stiff-Person Syndrome dari Celine Dion

Ketika Tubuh Mendadak Kaku

Celine Dion baru mengetahui penyebab keluhan yang dialaminya setelah 17 tahun. Stiff-person syndrome, gangguan neurologis langka yang membuat otot kaku dan mengalami kejang menyakitkan, kerap sulit dikenali karena gejalanya dapat menyerupai penyakit lain.

Selama bertahun-tahun, publik mungkin hanya mengetahui Celine Dion beberapa kali membatalkan penampilan karena alasan kesehatan. Infeksi sinus, batuk, hingga gangguan kesehatan lain pernah menjadi penjelasan di balik absennya diva asal Kanada itu dari panggung.

Namun, kondisi yang sebenarnya jauh lebih kompleks.

Celine Dion mengungkapkan bahwa dirinya telah mengalami gejala selama sekitar 17 tahun sebelum akhirnya mendapat diagnosis stiff-person syndrome (SPS) pada 2022. Dalam wawancara terbaru dengan Harper's Bazaar, penyanyi berusia 58 tahun itu menceritakan bagaimana gangguan tersebut perlahan memengaruhi tubuh, mobilitas, hingga kemampuannya bernyanyi dan tampil di atas panggung.

Kisah Dion memperlihatkan satu persoalan penting dalam penyakit langka: perjalanan menuju diagnosis tidak selalu singkat. SPS merupakan gangguan neurologis langka yang berkaitan dengan proses autoimun.

Kondisi ini dapat menyebabkan kekakuan otot yang berat, spasme atau kejang otot yang menyakitkan, serta gangguan pergerakan. Pada sebagian pasien, gejala dapat berkembang secara perlahan dan semakin mengganggu aktivitas sehari-hari.

Otot Kehilangan Kendali

Secara sederhana, sistem saraf seharusnya mengatur kapan otot berkontraksi dan kapan otot rileks. Pada SPS, mekanisme pengaturan tersebut terganggu sehingga otot dapat terus berada dalam kondisi tegang atau kaku.

Kekakuan umumnya dapat terjadi pada otot punggung, perut, pinggul, dan tungkai, meski bagian tubuh lain juga bisa terdampak. Selain itu, penderita dapat mengalami spasme yang sangat menyakitkan.

Pemicu kejang pun terkadang tampak sepele. Suara keras yang datang tiba-tiba, sentuhan, gerakan mendadak, hingga tekanan emosional dapat memicu spasme. Respons kaget

yang berlebihan ini berpotensi menyebabkan penderita kehilangan keseimbangan dan jatuh. Pada kasus yang berat, gangguan tersebut dapat membatasi kemampuan seseorang untuk berjalan atau bergerak. Itulah yang dialami Dion.

Dalam kisah yang dibagikannya, rasa sakit dan kekakuan yang muncul kadang begitu berat hingga ia hampir tidak bisa berjalan. Sebelum mendapatkan diagnosis, Dion bahkan mengaku pernah menggunakan Valium dosis tinggi agar tetap mampu berfungsi dan menjalani aktivitas.

Namun, penggunaan obat tertentu untuk mengatasi gejala tidak boleh ditiru atau dilakukan tanpa pengawasan dokter. Obat golongan benzodiazepin, termasuk diazepam, dapat digunakan dalam penanganan SPS pada kondisi tertentu, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan dipantau tenaga medis.

Sulit Didagnosis

Salah satu tantangan terbesar SPS adalah gejalanya yang dapat menyerupai berbagai gangguan lain.

Menurut National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), SPS dapat keliru dikenali sebagai penyakit Parkinson, multiple sclerosis, fibromyalgia, gangguan psikosomatis, hingga gangguan kecemasan atau fobia.

Keterlambatan diagnosis dapat terjadi karena gejala SPS menyerupai sejumlah penyakit neurologis maupun gangguan otot dan tulang lainnya. Karena itu, pemeriksaan oleh dokter, terutama spesialis saraf, menjadi bagian penting dalam proses penegakan diagnosis.

Diagnosis tidak cukup hanya berdasarkan keluhan tubuh terasa kaku.

Dokter dapat melakukan pemeriksaan neurologis dan berbagai pemeriksaan penunjang. Salah satunya adalah pemeriksaan antibodi tertentu dalam darah, termasuk antibodi terhadap glutamic acid decarboxylase atau GAD65. Pemeriksaan elektromiografi atau EMG juga dapat dilakukan untuk melihat aktivitas listrik otot. Dalam kondisi tertentu, pemeriksaan MRI

otak dan tulang belakang digunakan untuk membantu menyingkirkan kemungkinan penyebab lain dari kekakuan dan gangguan pergerakan.

Langka dan Terkait Autoimun

SPS diyakini berkaitan dengan respons autoimun yang keliru. Sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh justru dapat menyerang bagian tertentu dari sistem saraf yang berperan dalam pengendalian aktivitas otot.

Pada banyak pasien, ditemukan antibodi terhadap GAD65. Namun, SPS juga dapat berkaitan dengan antibodi lain. Selain itu, sebagian penderita memiliki penyakit autoimun

lain, seperti diabetes tipe 1 atau gangguan tiroid autoimun.

Meski demikian, penyakit ini tergolong langka dan mekanisme biologisnya tidak sepenuhnya sama pada setiap pasien.

Kondisi SPS juga berada dalam spektrum gangguan yang lebih luas. Ada bentuk yang lebih terlokalisasi pada anggota tubuh tertentu dan terdapat pula bentuk yang lebih berat, seperti progressive encephalomyelitis with rigidity and myoclonus (PERM). (far,iat/dya)



Ikan 'Iblis' Tanpa Mata Ditemukan di Gua AS



Para peneliti menemukan spesies ikan gua langka dengan penampilan tidak biasa di Gua Bobcat, dekat Huntsville, Amerika Serikat. Ikan tersebut tidak memiliki mata dan pigmen tubuh, memiliki punggung bungkuk, sirip berduri, serta bentuk moncong yang berbeda dari ikan gua lain yang pernah diidentifikasi.

Temuan itu berawal dari survei yang dilakukan Profesor Madya Ilmu Biologi Universitas Alabama di Huntsville, Dr. Matthew Niemiller. Hasil penelitian mengenai spesies tersebut kemudian dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports.

Niemiller mengatakan, ia sebelumnya telah menemukan dan mempelajari berbagai jenis ikan gua yang memiliki kemiripan secara genetik. Namun, ikan yang ditemukan

di Gua Bobcat menunjukkan karakteristik yang berbeda.

"Tetapi yang satu ini berbeda dalam beberapa hal yang terus terbukti benar," kata Niemiller.

Untuk mengidentifikasi spesies tersebut, tim peneliti melakukan serangkaian pemeriksaan, mulai dari pemindaian CT, pengujian genetik, hingga analisis lainnya. Hasilnya menunjukkan struktur kerangka ikan itu berbeda dibandingkan hewan lain yang sebelumnya telah diidentifikasi di dalam gua tersebut.

Temuan ini juga memunculkan kekhawatiran terkait kelangsungan hidup spesies tersebut. Berdasarkan pengetahuan para peneliti saat ini, ikan itu hanya diketahui hidup di satu lokasi.

"Spesies ini hanya dikenal dari satu lokasi berdasarkan pengetahuan

terbaik kami, dengan kemungkinan ukuran populasi yang sangat kecil," ungkap Niemiller.

Tak Miliki Pigmen

Adaptasi terhadap kehidupan di lingkungan gelap membuat ikan tersebut memiliki ciri fisik yang mencolok. Niemiller menjelaskan, spesies itu tidak memiliki mata, memiliki punggung bungkuk, sirip berduri, serta moncong yang berbeda dibandingkan spesies ikan gua lainnya.

Tubuhnya juga tidak memiliki pigmen atau warna. Kondisi tersebut membuat bagian otak ikan dapat terlihat jelas ketika terkena cahaya terang.

Karakteristik itu membedakan spesies baru tersebut dari sejumlah ikan gua lain yang pernah diamati para peneliti. Lingkungan gua yang gelap secara permanen memang dapat mendorong munculnya adaptasi khusus pada organisme yang hidup di dalamnya, termasuk perubahan pada penglihatan dan pigmentasi tubuh.

Selain karakteristik fisiknya yang unik, penamaan ikan tersebut juga memiliki cerita tersendiri..

Salah satu penulis penelitian, Armbruster, diketahui memiliki keterkaitan dengan munculnya julukan ikan gua "iblis". Ia merupakan penggemar serial Stranger Things.

Ketika spesies itu ditemukan, serial tersebut disebut tengah mendekati perilisasi musim berikutnya. Armbruster kemudian

mengusulkan nama Demogorgon, tokoh monster dalam serial Stranger Things, karena dianggap memiliki kemiripan dengan penampilan ikan tersebut.

Julukan "ikan iblis" pun melekat pada spesies tersebut karena keterkaitannya dengan nama Demogorgon, makhluk fiktif yang dikenal sebagai monster dari dunia lain dalam serial tersebut.

Selain mengidentifikasi ciri fisik dan genetika spesies tersebut, para peneliti juga mencoba memahami pola makannya.

Armbruster menyebut ikan gua tersebut kemungkinan bukan pemakan yang terlalu selektif. Di tengah lingkungan gua yang memiliki sumber makanan terbatas, spesies itu diduga memanfaatkan apa pun yang dapat dikonsumsi.

"Ikan gua iblis kemungkinan besar memakan apa pun yang muat di mulutnya," imbuhnya.

Jika populasi ikan itu memang sangat kecil dan hanya bergantung pada satu ekosistem gua, perubahan lingkungan atau gangguan terhadap habitat dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan spesies tersebut. (farist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)

download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO-SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT REDAKSI** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Ragam Bandana yang Kembali Naik Daun

Bandana kembali merebut perhatian dunia fesyen pada 2026. Aksesori yang pernah identik dengan era 1990-an dan awal 2000-an itu kini hadir dalam berbagai interpretasi baru, mulai dari model zig zag ala Y2K, scarf-lace bernuansa romantis, hingga headband sporty dan aksesoris metal yang lebih futuristik.

Tren ini tidak sekadar lahir dari nostalgia. Di panggung mode internasional, scarf styling menjadi salah satu benang merah musim semi/musim panas 2026. Syal dan scarf tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelengkap, melainkan menjadi bagian utama penampilan: dililitkan di kepala, diikat di pinggang, disampirkan di bahu, hingga diolah menjadi elemen busana.

Bandana yang dulu kerap dianggap sebagai aksesoris sederhana dari era 1990-an dan awal 2000-an kembali menemukan panggungnya pada 2026. Kali ini, kebangkitannya tidak berhenti pada nostalgia. Dari street style hingga peragaan busana, aksesoris rambut tersebut muncul dalam beragam bentuk: zig zag plastik khas Y2K, headscarf bermotif, sport headband, polkadot, lace, rajut, sampai desain metal yang lebih futuristik.

Kembalinya bandana sejalan dengan arah fesyen 2026 yang semakin memberi ruang bagi aksesoris berkarakter. Vogue mencatat scarf styling menjadi salah satu tren penting musim panas tahun ini. Scarf tak lagi sekadar menjadi pelengkap, tetapi digunakan sebagai bagian utama dari penampilan, mulai dari dililitkan di tubuh hingga dikenakan sebagai

penutup kepala. Fenomena itu juga terlihat di kalangan selebritas. Kendall Jenner, Zendaya, Elle Fanning, Kaia Gerber hingga Dua Lipa menjadi deretan nama yang ikut membawa bandana kembali ke radar mode. Harper's Bazaar bahkan menyebut musim panas 2026 sebagai momen ketika bandana bertransformasi dari aksesoris liburan menjadi bagian dari gaya sehari-hari.

Di tengah tren tersebut, setidaknya ada tujuh model bandana dan headband yang kembali mencuri perhatian.

Bandana Zig Zag

Model zig zag menjadi salah satu bentuk kebangkitan Y2K yang paling mudah dikenali. Bentuknya bergelombang atau bergerigi, mengikuti kontur kepala dan berfungsi menahan rambut agar tetap rapi.

Aksesori ini pernah sangat populer pada era 1990-an hingga awal 2000-an. Kini, Hailey Bieber menjadi salah satu figur yang ikut menghidupkan kembali tren tersebut. British Vogue mencatat Bieber tampil mengenakan zig-zag headband yang mengingatkan publik pada gaya David Beckham pada awal 2000-an. Aksesori serupa juga pernah dikenakan Bella Hadid dan Alexa Demie.

Allure bahkan menyoroti bagaimana Bieber berulang kali memasukkan aksesoris tersebut ke dalam penampilannya. Sementara Glamour menyebut zig-zag headband telah bergerak dari sekadar nostalgia menjadi salah satu aksesoris yang kembali mengisi tren musim gugur

2026. Daya tariknya terletak pada bentuk yang sederhana, fungsional, tetapi langsung memberi sentuhan Y2K. Bandana zig zag dapat dipadukan dengan busana kasual, sporty, hingga tampilan yang lebih polished.

Bandana Caps

Jika bandana klasik biasanya berupa kain yang diikat sendiri, bandana caps menawarkan versi yang lebih praktis. Konsepnya menggabungkan fungsi penutup kepala dengan elemen scarf, sehingga menghasilkan siluet yang terasa sporty sekaligus kasual.

Model ini menarik karena tidak lagi membatasi bandana sebagai aksesoris feminin. Bentuknya yang praktis membuatnya dapat digunakan oleh siapa saja dan mudah dipadukan dengan gaya sehari-hari.

Kebangkitan berbagai bentuk penutup kepala juga menjadi bagian dari lanskap mode 2026. Who What Wear mencatat aksesoris kepala **kembali** memainkan peran lebih besar dalam membentuk keseluruhan penampilan, bukan hanya sebagai pelengkap. Bandana caps bisa menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mendapatkan efek laid-back dari scarf tanpa harus repot mengatur simpul dan lipatan kain.

Sport Headband

Sport headband pada awalnya dirancang dengan fungsi yang jelas: menyerap keringat dan menjaga rambut agar tidak jatuh ke wajah saat beraktivitas. Namun pada 2026, fungsi praktis justru menjadi salah satu



kekuatannya. Headband kini kembali diposisikan sebagai aksesoris yang dapat digunakan dari gym hingga aktivitas harian.

ELLE menyoroti kebangkitan headband sebagai aksesoris yang mampu memberi kesan chic sekaligus praktis. Model ini juga muncul dalam interpretasi Miu Miu, yang membawa kembali nuansa headband elastis sederhana ke panggung mode.

Jabatan Tanpa Tenggat..dari Hal 1

Gugatan terbaru ini menunjukkan satu persoalan yang belum selesai sejak 2025. Salah satunya adalah UU Polri tidak menetapkan periodisasi masa jabatan Kapolri secara tetap di luar batas usia pensiun.

Selama ini, undang-undang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR, tetapi tidak mencantumkan angka tahun yang menjadi batas akhir masa kepemimpinan seorang Kapolri.

Para pemohon menilai kekosongan itu membuat masa jabatan Kapolri menjadi elastis dan membuka ruang subjektivitas politik eksekutif.

"Ketidadaan batas waktu yang rigid atau indikator periodik yang jelas bagi seorang Kapolri, di luar batas usia pensiun normal, menyebabkan posisi tersebut rawan terhadap subjektivitas politik eksekutif dan berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang mencederai hak konstitusional para pemohon," kata pemohon dalam berkas gugatannya dikutip Selasa (23/8/2026).

Perkara 315/PUU-XXIV/2026 bukan gugatan pertama yang mempertanyakan durasi kepemimpinan Kapolri. Sejak 2025, setidaknya sudah ada empat perkara yang menguji persoalan tersebut.

Perkara pertama adalah 19/PUU-XXIII/2025, diajukan Syukur Destieli Gulo, Christian Adrianus Sihite, dan Devita Analisandra. Para pemohon pada pokoknya meminta masa jabatan Kapolri dikaitkan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang mengangkatnya.

MK menolak permohonan tersebut pada 13 November 2025. Mahkamah berpandangan bahwa mengakhiri masa jabatan Kapolri bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden berpotensi menggeser posisi Kapolri menjadi bagian dari kabinet.

"Adalah permohonan yang dalam batas penalaran yang wajar akan menggeser posisi jabatan Kapolri menjadi anggota kabinet," kata Hakim Konstitusi Arsul Sani ketika membacakan putusan.

Menurut Mahkamah, Polri merupakan alat negara sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Karena itu, kedudukan Kapolri tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan menteri yang merupakan bagian dari kabinet.

Perkara kedua, 147/PUU-XXIII/2025, diajukan Cindy Allyssa dan Syamsul Jahidin. Gugatan ini secara khusus mempersoalkan Pasal 11 ayat (2) UU Polri dan ketidadaan batas periodisasi jabatan Kapolri.

Pemohon menilai kondisi tersebut dapat menghambat regenerasi kepemimpinan dan berisiko membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

MK kembali memberikan putusan pada 13 November 2025. Dalam perkara ini, permohonan Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima, sementara permohonan Pemohon I ditolak seluruhnya.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan konstruksi yang sama. Kapolri merupakan jabatan karier profesional yang memiliki batas masa jabatan, tetapi batas tersebut tidak ditentukan berdasarkan periodisasi tetap seperti jabatan politik.

Setelah dua perkara tersebut kandas, persoalan yang sama kembali muncul melalui Perkara Nomor 77/PUU-XXIV/2026. Pemohonnya adalah mahasiswa bernama Tri Prasetyo Putra Mumpuni.

Tri meminta agar Pasal 11 UU Polri dimaknai mengatur secara tegas batas masa jabatan Kapolri. Ia juga mempersoalkan kekosongan hukum mengenai durasi jabatan tersebut.

Namun perkara itu tidak sampai pada pengujian substansi. Pada 16 April 2026, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena rumusan petitum dinilai kabur dan kontradiktif.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan bahwa pemohon mengajukan petitum dengan konsekuensi hukum yang saling bertentangan. Karena persoalan tersebut, Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan pokok permohonan lainnya lebih lanjut.

Perkara keempat kini datang dengan objek yang lebih baru, yakni UU Nomor 5 Tahun 2026.

Para pemohon dalam perkara terbaru tidak sekadar meminta angka lima tahun dicantumkan dalam undang-undang.

Mereka juga mengusulkan mekanisme yang mengikat Presiden ketika menentukan keberlanjutan masa jabatan Kapolri. Evaluasi kinerja berkala yang transparan dan objektif oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) diminta menjadi salah satu dasar perpanjangan, yang kemudian harus memperoleh persetujuan DPR.

Dengan desain itu, pemohon ingin keputusan mengenai perpanjangan jabatan tidak sepenuhnya bergantung pada preferensi politik Presiden.

Mereka juga meminta alasan pemberhentian Kapolri sebelum masa jabatan berakhir dibatasi secara jelas, antara lain karena permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, atau dijatuhi pidana.

Para pemohon juga membawa argumentasi mengenai kesetaraan

antarlembaga negara.

Mereka membandingkan jabatan Kapolri dengan sejumlah posisi strategis lain yang pengangkatannya melibatkan Presiden dan DPR tetapi memiliki batas masa jabatan yang lebih jelas.

"Jabatan-jabatan strategis lain yang pengangkatannya memerlukan persetujuan DPR dan bertanggung jawab kepada Presiden (seperti Pimpinan KPK atau Hakim Konstitusi) diikat oleh mekanisme akuntabilitas yang sangat ketat dan terukur," tulis pemohon dalam berkasnya.

Pemohon merujuk pada pimpinan KPK yang memiliki masa jabatan lima tahun, sedangkan hakim konstitusi memiliki masa jabatan maksimal 10 tahun dengan batas usia pensiun 70 tahun.

Dari perbandingan itu, mereka menilai Kapolri justru memiliki ruang masa jabatan yang lebih elastis karena tidak terdapat periodisasi yang rigid di luar batas usia pensiun.

"Menempatkan Kapolri sebagai satu-satunya pimpinan lembaga koersif bersenjata tanpa adanya kejelasan instrumen, merupakan bentuk diskriminasi normatif yang merusak harmoni tata kelola kelembagaan negara hukum," tulis pemohon.

Argumentasi itu kemudian diperkuat dengan kekhawatiran mengenai absennya pengawasan eksternal yang mengikat.

"Pemberian posisi Kapolri berjalan tanpa jangkar pengawasan berkala eksternal, melahirkan hak istimewa (privilege) yang tidak proporsional bagi sebuah lembaga koersif (coercive power) yang memegang senjata," paparkan pemohon.

Dalam konstruksi pemohon, persoalannya bukan semata-mata lama seorang Kapolri menduduki kursi pimpinan. Yang dipersoalkan adalah mengapa jabatan dengan kekuasaan koersif yang besar tidak memiliki mekanisme evaluasi periodik yang sama tegasnya dengan sejumlah jabatan strategis lain.

Kompolnas Singgung Meritokrasi

Di tengah perdebatan mengenai perlu atau tidaknya fixed term, Kompolnas menawarkan titik tekan yang berbeda.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengatakan pembahasan masa jabatan Kapolri perlu ditempatkan dalam konteks pembangunan sistem meritokrasi di internal Polri.

"Yang harus kita pedoman dalam konteks ini, yang paling penting adalah meritokrasi yang sedang dibangun dalam internal kepolisian. Rekan-rekan kepolisian itu membangun sistem meritokrasi," kata Anam, Selasa (25/8/2026).

Menurut dia, meritokrasi tidak berhenti pada urusan promosi

individu. Sistem tersebut menentukan profesionalitas institusi secara keseluruhan.

"Meritokrasi itu yang paling penting adalah tidak hanya soal karier, ya si A kariernya bagaimana dan sebagainya, tapi juga meritokrasi itu yang paling penting adalah membuat polisi jauh lebih profesional," ujarnya.

Anam menjelaskan, jenjang karier anggota Polri berlangsung bertahap. Seorang perwira tidak semestinya dapat meloncat begitu saja ke jabatan atau pangkat lebih tinggi tanpa memenuhi persyaratan masa kerja dan pengalaman.

Karena itu, menurut Anam, meritokrasi yang berjalan konsisten secara tidak langsung akan membuat waktu menuju posisi Kapolri menjadi lebih terukur.

"Dengan jalannya sistem meritokrasi saya kira secara sistemik waktu menjadi Kapolri lebih rigid," ujarnya. Ia memberi gambaran sederhana mengenai mekanisme tersebut. (wid,kcm,rls,kan/dya)

TIGA KALI GUGATAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) GAGAL

Perkara Nomor 19/PUU-XXIII/2025

- **Inti Gugatan:** Meminta pembatasan masa jabatan Kapolri maksimal 5 tahun.
- **Status/Putusan:** Ditolak oleh MK pada 13 November 2025. Mahkamah berpendapat bahwa jabatan Kapolri merupakan jabatan karier profesional yang tidak otomatis berakhir mengikuti siklus jabatan politik (seperti masa jabatan Presiden).

Perkara Nomor 147/PUU-XXIII/2025

- **Pemohon:** Cindy Allyssa dan Syamsul Jahidin.
- **Inti Gugatan:** Menggugat Pasal 11 ayat (2) UU Kepolisian. Pemohon berargumen bahwa ketidadaan batas jabatan dapat menghambat regenerasi perwira di tubuh Polri serta berisiko memicu penyalahgunaan wewenang.
- **Status/Putusan:** Ditolak oleh MK secara bersamaan dengan perkara nomor 19 pada November 2025 karena Mahkamah tidak mengubah pendirian hukumnya dari putusan sebelumnya.

Perkara Nomor 77/PUU-XXIV/2026

- **Inti Gugatan:** Mempersoalkan kekosongan hukum atau ketidadaan pengaturan durasi masa jabatan Kapolri yang rigid.
- **Status/Putusan:** Tidak dapat diterima (N.O.) oleh MK pada April 2026. Hal ini disebabkan rumusan petitum permohonan dinilai saling bertentangan (kontradiktif) dan tidak lazim, sehingga substansi pokok perkara belum sempat diuji.

MAHKAMAH KONSTITUSI

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi atau Tito, membenarkan pemberian sanksi tersebut pada Selasa (25/8/2026). Menurut dia, sanksi dijatuhkan berdasarkan hasil pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran.

"Benar, bahwa Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Sanksi diberikan berdasarkan hasil pengawasan atas pemenuhan kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran pada areal yang mereka kelola," kata Tito.

Enam perusahaan tersebut tersebar di tiga provinsi di Kalimantan. Empat perusahaan beroperasi di Kalimantan Barat, yakni PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP. Sementara PT NES beroperasi di Kalimantan Tengah dan PT PSR berada di Kalimantan Timur.

Dari enam perusahaan tersebut, lima dikenai sanksi berupa Paksaan Pemerintah. Sementara PT MPK mendapatkan dua jenis sanksi sekaligus, yakni Pembekuan Perizinan Berusaha dan Paksaan Pemerintah.

Kemenhut memberikan sanksi lebih berat kepada PT MPK karena kebakaran di areal perusahaan tersebut ditemukan terjadi secara luas dan berulang. Kondisi itu menjadi dasar pemerintah untuk tidak hanya memberikan Paksaan Pemerintah, tetapi juga membekukan perizinannya.

Melalui sanksi tersebut, perusahaan diwajibkan memperbaiki sistem pengendalian kebakaran serta melakukan pemulihan terhadap areal yang terdampak. Kewajiban tersebut harus diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan pemerintah.

"Melalui sanksi tersebut, perusahaan diwajibkan membenahi sistem pengendalian kebakaran dan memulihkan areal terdampak dalam batas waktu yang ditetapkan. Pelaksanaannya akan terus diawasi dan dievaluasi," ujar Tito.

Kemenhut menyatakan pengawasan tidak berhenti setelah sanksi dijatuhkan. Pelaksanaan kewajiban perusahaan akan dipantau dan dievaluasi untuk memastikan langkah pencegahan, pengendalian, serta pemulihan benar-benar dilakukan.

Apabila keenam perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, Kemenhut dapat meningkatkan tingkat sanksi. Eskalasi sanksi tersebut bahkan dapat berujung pada pencabutan perizinan berusaha.

Namun, Kemenhut menegaskan sanksi administratif tidak otomatis berarti keenam perusahaan terbukti

KEMENHUT SANKSI 6 PERUSAHAAN TERKAIT KARHUTLA DI KALIMANTAN

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terkait kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di areal yang mereka kelola. Enam perusahaan tersebut tersebar di tiga provinsi di Kalimantan. Empat perusahaan beroperasi di Kalimantan Barat, yakni PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP. Sementara PT NES beroperasi di Kalimantan Tengah dan PT PSR berada di Kalimantan Timur.



Umat Islam melaksanakan Shalat Istisqa atau shalat meminta hujan di halaman Griya Agung Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (25/8/2026). (Ist.antara)

sengaja menyebabkan kebakaran. Pemerintah membedakan persoalan kepatuhan administratif perusahaan dengan pembuktian unsur pidana.

"Perlu diluruskan bahwa sanksi administratif ini berkaitan dengan kepatuhan dan tanggung jawab perusahaan menjaga areal kelolanya. Hal tersebut tidak serta-merta menjadi kesimpulan bahwa perusahaan sengaja menyebabkan kebakaran," kata Tito.

Dengan kata lain, keberadaan kebakaran di areal perusahaan menjadi bagian dari dasar pengawasan terhadap tanggung jawab pemegang izin, tetapi belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa kebakaran tersebut dilakukan secara sengaja oleh perusahaan.

Kemenhut masih membuka kemungkinan proses hukum pidana jika dalam pemeriksaan lebih lanjut ditemukan bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran pidana.

"Apabila dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan unsur pidana berdasarkan alat bukti, proses pidana tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum," ujar Tito.

Penjatuhan sanksi administratif ini

berlangsung ketika pemerintah sedang meningkatkan penanganan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Ancaman kebakaran meningkat seiring kondisi musim kemarau dan fenomena El Nino yang berdampak terhadap meningkatnya kondisi kering di sejumlah daerah.

Kemenhut menegaskan pintu penegakan hukum pidana tetap terbuka. Jika pemeriksaan lanjutan menemukan unsur pidana yang didukung alat bukti, perusahaan atau pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Prabowo Targetkan Kebakaran Tuntas 1-2 Pekan

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia dapat dituntaskan dalam satu hingga dua pekan. Target tersebut disampaikan ketika pemerintah meningkatkan penanganan karhutla di tengah kondisi El Nino yang diperkirakan cukup kuat tahun ini.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri groundbreaking Program Pembangkit

Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Menurut Prabowo, El Nino tahun ini menjadi salah satu yang terkuat yang telah diprediksi. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kerawanan, termasuk kebakaran hutan dan lahan.

"Tahun ini dunia mengalami apa yang disebut El Nino dan El Nino ini cukup kuat tahun ini, salah satu yang terkuat diramalkan," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan dampak El Nino tidak hanya dirasakan Indonesia. Fenomena tersebut terjadi di berbagai negara dan berpengaruh terhadap kondisi musim yang lebih kering.

Karena itu, pemerintah meningkatkan mitigasi sekaligus penanganan karhutla di sejumlah daerah. Prabowo mengaku telah berkeliling ke beberapa lokasi untuk melihat langsung kondisi dan memastikan penanganan berjalan.

"Kita bersyukur, saya sudah keliling ke beberapa tempat, saya cek sendiri, syukur alhamdulillah semua unsur pemerintah daerah, K/L, TNI, Polri, BNPB, lingkungan hidup, kehutanan, semua bekerja secara efektif," ujar Prabowo.

Presiden menilai kondisi karhutla di sejumlah lokasi mulai dapat dikendalikan. Ia berharap seluruh penanganan dapat segera diselesaikan. "Sekarang saya kira sudah mulai teratasi, termitigasi, di beberapa tempat saya kira saya berharap dalam satu dua minggu ini bisa selesai semua," katanya.

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mengerahkan berbagai peralatan dan personel. Prabowo menyebut operasi penanganan karhutla melibatkan puluhan helikopter dan belasan pesawat untuk mendukung pemadaman dari udara.

Selain itu, pemerintah menggunakan ratusan sumur bor dan pompa air. Ribuan personel juga dikerahkan untuk menangani sekaligus mencegah meluasnya kebakaran. (gus,ant,ist,kcm/dya)